



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2019/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sawai, 17 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupetan Maluku Tengah, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sawai, 07 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupetan Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 191/Pdt.P/2019/PA Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 14-03-1979 bertempat di Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara. Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh bapak Hi. Halik Musiin dengan Wali Nikah Morsidi Rumasoreng dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi : Bapak Mat Tomagola dan Bapak Abdurrahman Mewar.

Hlm 1 dari 4 Anonimasi Penetapan 191/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama: Nurlela Lampung, tempat dan tanggal lahir Sawai, 19-06-2002;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14-03-1979 di Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara.
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun surat panggilan (relaas)/Pengumuman Nomor 191/Pdt.P/2019/PA Msh, tanggal 05 April 2019 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm 2 dari 4 Anonimasi Penetapan 191/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan/ pengumuman Nomor 191/Pdt.P/2019/PA Msh, tanggal 05 April 2019, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, biaya perkara sebagaimana diktum di bawah ini dibebankan kepada Pihak Ketiga (Sponsor).

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon, gugur ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah), sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat 26 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1340 H., oleh ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu HASNIAR SURUDJI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm 3 dari 4 Anonimasi Penetapan 191/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal ,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti ,

ttd

HASNIAR SURUDJI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 96.000,-
Sembilan puluh enam ribu rupiah

Salinan Penetapan ini sama bunyinya
dengan aslinya.



Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Hlm 4 dari 4 Anonimasi Penetapan 191/Pdt.P/2019/PA Msh